

Strategi Implementasi Program Unggulan Penurunan Prevalensi Stunting (Pangling) dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pandeglang

Masroni¹⁾, Ihyauddin²⁾, Maya Oktaviani³⁾, Saripan⁴⁾

^{1,2,3,4} Institut Kemandirian Nusantara, Indonesia

Email: masroni@iknus.ac.id¹⁾, kirimkeihya@gmail.com²⁾, mayaoktaviani@iknus.ac.id³⁾, ipanbeckham@gmail.com⁴⁾

Abstract: *This study aims to analyze the implementation strategy of the Pangling Program in reducing stunting prevalence and identify the factors influencing its effectiveness. A qualitative descriptive approach was employed using document analysis of the Final Report of the Pandeglang Regency Flagship Program (2025–2030), supported by relevant policy documents and scientific literature. Data were analyzed using the policy implementation model of George C. Edward III, complemented by the Urgency, Seriousness, and Growth (USG) method to determine priority issues. The findings indicate that the Pangling Program has contributed to reducing stunting prevalence through multisectoral collaboration involving local government agencies, health facilities, village governments, and the Regional Stunting Reduction Acceleration Team. The novelty of this study lies in integrating Edward III's implementation framework with the USG method to formulate strategic priorities for strengthening regional stunting policies.*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi strategi Program Pangling dalam menurunkan prevalensi stunting serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi dokumentasi terhadap Laporan Akhir Program Unggulan Kabupaten Pandeglang Tahun 2025–2030, yang didukung oleh berbagai dokumen kebijakan dan literatur ilmiah. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang dipadukan dengan metode Urgency, Seriousness, and Growth (USG) untuk menentukan prioritas permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pangling berkontribusi terhadap penurunan prevalensi stunting melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan organisasi perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah desa, serta Tim Percepatan Penurunan Stunting. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi teori implementasi kebijakan Edward III dengan metode USG sebagai pendekatan untuk menentukan prioritas strategi dalam penguatan kebijakan penurunan stunting di tingkat daerah.*

Keywords : *Stunting; Implementasi Kebijakan; Program Pangling; USG; Pembangunan Daerah*

PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan. Stunting masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan kesehatan global karena berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia di berbagai negara berkembang, produktivitas ekonomi, dan daya saing suatu bangsa. *World Health Organization (WHO)* mendefinisikan stunting sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang

terjadi sejak periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sehingga tinggi badan menurut umur berada di bawah standar pertumbuhan. Dampak stunting tidak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan kognitif, kemampuan belajar, produktivitas pada usia dewasa, serta meningkatkan risiko penyakit tidak menular. Oleh karena itu, penanganan stunting menjadi bagian penting dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 2 (*Zero Hunger*) dan Tujuan 3 (*Good Health and Well-being*) (WHO, 2023; UNICEF, 2024).

Indonesia merupakan salah satu negara yang menempatkan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan nasional. Berbagai intervensi telah dilakukan melalui pendekatan gizi spesifik dan gizi sensitif, namun UNICEF menegaskan bahwa keberhasilan penurunan stunting tidak hanya ditentukan oleh intervensi kesehatan, tetapi juga oleh efektivitas tata kelola, koordinasi lintas sektor, kualitas data, pembiayaan, dan kapasitas kelembagaan. Meskipun prevalensi stunting nasional menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, tantangan implementasi masih ditemukan pada berbagai daerah, terutama dalam aspek koordinasi program, integrasi data sasaran, dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah, percepatan penurunan stunting ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kebijakan tersebut mengamanatkan pendekatan konvergensi yang mengintegrasikan intervensi lintas sektor melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan keluarga. Pendekatan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam mengoordinasikan pelaksanaan program sehingga keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi di tingkat daerah. Evaluasi UNICEF terhadap Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting juga menunjukkan bahwa penguatan koordinasi antarlembaga, sistem pemantauan, kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi data menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu daerah di Provinsi Banten yang menjadikan penurunan prevalensi stunting sebagai prioritas pembangunan daerah melalui Program Unggulan Penurunan Prevalensi Stunting (Pangling). Program ini dirancang sebagai implementasi kebijakan nasional dengan mengedepankan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah desa, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Intervensi yang dilakukan meliputi peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, peningkatan sanitasi lingkungan, penguatan ketahanan pangan keluarga, serta pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Laporan Akhir Program Unggulan Kabupaten Pandeglang, prevalensi stunting mengalami penurunan dari 37,8% pada tahun 2021 menjadi

29,4% pada tahun 2022, kemudian kembali menurun menjadi 28,6% pada tahun 2023. Meskipun menunjukkan capaian positif, angka tersebut masih memerlukan upaya percepatan melalui penguatan implementasi kebijakan dan peningkatan efektivitas koordinasi lintas sector.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan percepatan penurunan stunting dipengaruhi oleh efektivitas implementasi kebijakan, komunikasi antarpelaksana, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta koordinasi kelembagaan. Penelitian Simbolon dkk. (2024), misalnya, menemukan bahwa komunikasi, keterbatasan sumber daya, kompleksitas birokrasi, dan lemahnya pengawasan menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di tingkat daerah. Penelitian lain juga menegaskan bahwa penguatan tata kelola kolaboratif dan integrasi sistem informasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan penurunan stunting.

Implementasi kebijakan merupakan faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan publik. Model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model ini masih banyak digunakan dalam penelitian administrasi publik karena dinilai relevan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan di berbagai sektor (Purwanto & Sulistyastuti, 2022; Nugroho, 2021).

Penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek kesehatan, status gizi, sanitasi, maupun evaluasi program secara umum. Penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi strategi program unggulan pemerintah daerah dalam perspektif administrasi publik, khususnya dengan mengombinasikan analisis implementasi kebijakan dan metode *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG) untuk menentukan prioritas perbaikan implementasi, masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan program penurunan stunting di tingkat daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi implementasi Program Unggulan Penurunan Prevalensi Stunting (Pangling) dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pandeglang. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis implementasi kebijakan dengan metode *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG) untuk mengidentifikasi prioritas permasalahan sekaligus merumuskan strategi penguatan implementasi program. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya implementasi kebijakan kesehatan, serta menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan Program Pangling.



Gambar 1. Fishbone Kendala Capaian Program Pangling
Sumber: FGD (Focus Group Discussion)

Prevalensi stunting di Kabupaten Pandeglang mengalami tren penurunan selama periode 2021–2023. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2022 sebesar 8,4 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2023 prevalensi stunting kembali menurun menjadi 28,6%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai intervensi pemerintah daerah melalui Program Pangling mulai memberikan dampak positif terhadap upaya percepatan penurunan stunting, meskipun angka prevalensi tersebut masih memerlukan penguatan program secara berkelanjutan.

Tahun	Prevalensi Stunting (%)	Perubahan
2021	37,8	-
2022	29,4	-8,4
2023	28,6	-0,8

Tabel 1. Data Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Pandeglang
Sumber: Diolah dari Laporan Program Unggulan Kabupaten Pandeglang 2025–2030.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis strategi implementasi Program Unggulan Penurunan Prevalensi Stunting (Pangling) dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pandeglang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai implementasi kebijakan berdasarkan konteks, proses, serta interaksi antaraktor yang terlibat dalam pelaksanaan program. Menurut *Creswell* dan *Poth* (2018),

penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi serta memahami makna suatu fenomena sosial melalui interpretasi terhadap data yang diperoleh secara alamiah.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan fokus pada implementasi Program Pangling sebagai salah satu program unggulan daerah dalam mendukung percepatan penurunan prevalensi stunting. Objek penelitian meliputi strategi implementasi program yang dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah desa, dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil Focus Group Discussion (FGD), observasi, dan diskusi bersama perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan Program Unggulan Kabupaten Pandeglang. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang meliputi Laporan Akhir Program Unggulan Kabupaten Pandeglang Tahun 2025–2030, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dokumen perencanaan daerah, laporan pemerintah, serta berbagai artikel ilmiah yang relevan dengan implementasi kebijakan dan percepatan penurunan stunting.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, capaian program, serta indikator keberhasilan Program Pangling. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi implementasi program di lapangan, sedangkan FGD digunakan sebagai sarana memperoleh masukan dari pemangku kepentingan mengenai kendala, peluang, dan strategi penguatan implementasi program.

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan menggunakan perspektif implementasi kebijakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan Program Pangling.

Untuk menentukan prioritas permasalahan implementasi, penelitian ini menggunakan metode *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG). Metode USG merupakan teknik penentuan prioritas masalah berdasarkan tiga dimensi, yaitu tingkat urgensi (*urgency*), tingkat keseriusan dampak (*seriousness*), dan potensi perkembangan masalah (*growth*). Hasil penilaian USG digunakan untuk menentukan isu prioritas yang memerlukan penanganan strategis dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi Program Pangling. Metode ini telah digunakan dalam proses evaluasi Program Unggulan Kabupaten Pandeglang melalui identifikasi akar penyebab permasalahan dan penentuan prioritas rekomendasi program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Unggulan Penurunan Prevalensi Stunting (Pangling) merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang dirancang untuk mendukung percepatan penurunan stunting melalui pendekatan konvergensi lintas sektor. Program ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah desa, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Fokus implementasi program diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, perbaikan sanitasi, ketahanan pangan keluarga, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Laporan Akhir Program Unggulan Kabupaten Pandeglang, Program Pangling menunjukkan capaian yang positif terhadap penurunan prevalensi stunting. Data menunjukkan prevalensi stunting menurun dari 37,8% pada tahun 2021 menjadi 29,4% pada tahun 2022, kemudian kembali menurun menjadi 28,6% pada tahun 2023. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa implementasi program telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penguatan koordinasi lintas sektor. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada di atas target nasional sehingga diperlukan penguatan strategi implementasi agar program berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi Program Pangling karena menentukan keberhasilan koordinasi antarinstansi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah membangun mekanisme koordinasi melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), rapat koordinasi lintas perangkat daerah, serta kegiatan sosialisasi kepada pemerintah desa dan masyarakat.

Meskipun demikian, efektivitas komunikasi belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai pembagian peran antar-OPD, sehingga beberapa kegiatan belum terlaksana secara terpadu. Selain itu, penyampaian informasi kepada kelompok sasaran belum sepenuhnya merata, terutama pada wilayah dengan akses pelayanan yang terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya memerlukan penyampaian informasi secara rutin, tetapi juga konsistensi pesan, koordinasi antarlembaga, serta mekanisme umpan balik yang berkelanjutan.

Keberhasilan implementasi Program Pangling juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, serta dukungan kelembagaan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah mengalokasikan berbagai sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program melalui sektor kesehatan, pemerintah desa, serta OPD terkait.

Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat keterbatasan jumlah tenaga pendamping, kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya integrasi data antarinstansi. Selain itu, perbedaan kapasitas kelembagaan antarwilayah menyebabkan kualitas pelaksanaan program belum merata. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi Program Pangling.

Disposisi atau komitmen pelaksana menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung percepatan penurunan stunting melalui Program Pangling. Komitmen tersebut tercermin dari penetapan program sebagai prioritas pembangunan daerah serta keterlibatan aktif berbagai perangkat daerah dalam pelaksanaan program. Meskipun demikian, komitmen individu pelaksana belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kapasitas teknis dan penguatan mekanisme koordinasi. Perbedaan tingkat pemahaman terhadap tujuan program masih ditemukan pada beberapa pelaksana di tingkat operasional sehingga memengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Struktur birokrasi dalam implementasi Program Pangling telah dibangun melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang melibatkan berbagai perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Struktur tersebut memberikan dasar koordinasi dalam pelaksanaan program secara lintas sector.



Gambar 2. FGD Analisis

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi dan monitoring masih memerlukan penguatan. Belum seluruh perangkat daerah memiliki sistem pelaporan yang terintegrasi sehingga proses monitoring dan evaluasi belum menghasilkan informasi yang komprehensif sebagai dasar

pengambilan keputusan. Penguatan tata kelola birokrasi melalui integrasi sistem informasi dan penyelarasan indikator kinerja menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi Program Pangling.

Tabel 2. Hasil USG Akar Penyebab Kendala Capaian Program Pangling

	Penyebab	Akar Masalah 1	Akar Masalah 2	U	S	G	Total	Rank
Man	Kurangnya tenaga medis terampil	Tidak cukupnya tenaga medis yang berkompeten	Kurangnya pelatihan untuk tenaga medis	3,29	4,47	4,18	11,94	8
	Kesadaran masyarakat yang rendah	Kurangnya kesadaran tentang bahaya stunting	Minimnya informasi yang diterima masyarakat	5,00	4,41	4,65	14,06	1
Money	Pendanaan yang terbatas	Dana yang tersedia sering kali tidak mencukupi	Keterbatasan anggaran dari pemerintah dan donor	3,76	4,24	4,29	12,29	7
	Dana yang tidak terdistribusi dengan baik	Penggunaan dana yang tidak efisien dan tepat sasaran	Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana	3,59	3,00	3,35	9,94	12
Method	Proses distribusi bantuan yang tidak efisien	Bantuan gizi sering kali terlambat sampai kepada yang membutuhkan	Kurangnya koordinasi antar lembaga	4,71	4,29	5,00	14,00	2
	Kurangnya inovasi dalam penanganan stunting	Tidak ada sistem pemantauan Inovasi yang baik	Kurangnya reward untuk inovasi yang sudah berjalan	3,29	3,88	4,53	11,71	10
Material	Ketersediaan pangan bergizi yang terbatas	Akses ke makanan bergizi yang sulit bagi sebagian masyarakat	Kurangnya distribusi bahan pangan bergizi	4,18	4,76	3,59	12,53	4
	Alat medis yang kurang memadai	Kurangnya alat dan fasilitas medis untuk menangani kasus stunting	Kurangnya dana untuk pengadaan alat medis	3,71	4,00	4,65	12,35	6
Milieu	Kondisi air minum dan sanitasi yang buruk	Lingkungan dengan air minum dan sanitasi yang buruk	Kurangnya fasilitas air minum dan sanitasi yang memadai	4,94	3,94	3,88	12,76	3
	Kebiasaan makan yang tidak sehat	Pola makan yang kurang variatif dan tidak seimbang	Kurangnya pengetahuan tentang pola makan sehat	3,24	4,35	4,68	12,47	5
Measurement	Monitoring dan evaluasi yang tidak efektif	Kurangnya memantau perkembangan anak-anak yang menerima bantuan	Tidak adanya data yang akurat dan up-to-date	4,65	3,18	3,59	11,41	11
	Evaluasi program yang tidak rutin	Kurangnya analisis hasil program secara berkala	Indikator kinerja yang dilaporkan tidak tepat waktu	3,24	5,00	3,59	11,82	9

Sumber: Hasil Survey Kuesioner

Analisis menggunakan metode Urgency, Seriousness, and Growth (USG) menunjukkan bahwa beberapa permasalahan implementasi memiliki tingkat prioritas yang tinggi untuk segera ditangani.

Permasalahan tersebut meliputi koordinasi lintas sektor yang belum optimal, kualitas data sasaran yang belum terintegrasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi. Hasil identifikasi ini sejalan dengan evaluasi Program Unggulan Kabupaten Pandeglang yang menggunakan pendekatan USG untuk menentukan akar penyebab kendala capaian Program Pangling.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, strategi penguatan implementasi yang direkomendasikan meliputi peningkatan koordinasi lintas sektor melalui forum koordinasi yang lebih terstruktur, pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk pengelolaan data sasaran, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas implementasi Program Pangling sekaligus mempercepat pencapaian target penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Pandeglang.



Gambar 3. Dokumentasi FGD

Stunting merupakan salah satu indikator pembangunan manusia yang menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Dalam dokumen Program Unggulan Kabupaten Pandeglang dijelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai intervensi secara konvergen melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, peningkatan sanitasi, serta penguatan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Berbagai intervensi tersebut menunjukkan hasil positif yang ditandai dengan penurunan prevalensi stunting dari 37,8% pada tahun 2021, menjadi 29,4% pada tahun 2022, dan kembali menurun menjadi 28,6% pada tahun 2023. Penurunan prevalensi tersebut menunjukkan bahwa Program Pangling telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Namun demikian, angka prevalensi tersebut masih menunjukkan bahwa stunting merupakan isu strategis yang memerlukan upaya berkelanjutan. Hal ini

menunjukkan bahwa keberhasilan penurunan prevalensi belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan sistem implementasi program di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang.



Gambar 4. Kegiatan FGD dengan OPD

Program Pangling merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang berorientasi pada percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pendekatan lintas sektor. Program ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah desa, kader kesehatan, serta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Pelaksanaan program dilakukan melalui koordinasi berbagai bentuk intervensi spesifik dan sensitif agar sasaran program memperoleh pelayanan secara terpadu.

Dalam dokumen evaluasi Program Unggulan Kabupaten Pandeglang, Program Pangling dievaluasi menggunakan metode USG untuk mengidentifikasi akar penyebab kendala implementasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa beberapa faktor masih menghambat efektivitas pelaksanaan program, sehingga diperlukan strategi penguatan pada periode pembangunan berikutnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Unggulan Penurunan Prevalensi Stunting (Pangling) telah memberikan kontribusi positif terhadap percepatan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Pandeglang melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah desa, dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Capaian penurunan prevalensi stunting mengindikasikan bahwa pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan nasional dalam percepatan penurunan stunting, meskipun efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program Pangling dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi antar pemangku kepentingan, ketersediaan sumber daya, komitmen

pelaksana, serta koordinasi dalam struktur birokrasi. Di sisi lain, penelitian juga mengidentifikasi beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain koordinasi lintas sektor yang belum optimal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum terintegrasinya data sasaran, serta belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi. Permasalahan tersebut menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di tingkat daerah.

Penerapan metode Urgency, Seriousness, and Growth (USG) memberikan gambaran mengenai prioritas permasalahan yang perlu segera ditangani sebagai dasar penyusunan strategi penguatan implementasi Program Pangling. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian merekomendasikan penguatan tata kelola kolaboratif, integrasi sistem informasi berbasis digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis kinerja. Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi Program Pangling secara berkelanjutan serta mendukung pencapaian target percepatan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Pandeglang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Institut Kemandirian Nusantara dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang, atas dukungan serta kesempatan yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas dukungan akademik yang diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N., & Rahmawati, S. (2024). Collaborative governance in accelerating stunting reduction in Indonesia. *Journal of Public Administration Studies*.
- Arifin, M., & Nugroho, R. (2023). Policy implementation in regional health development. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2023). *Rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting Indonesia 2021–2024*. BKKBN.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.

- Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Profil Kesehatan Indonesia 2023. Kementerian Kesehatan RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). Sage Publications.
- Fauziah, R., et al. (2022). Multi-sector collaboration in stunting reduction. BMC Public Health.
- Fitriani, D., & Hidayat, T. (2023). Local government innovation in reducing stunting prevalence. International Journal of Public Health Science.
- Handayani, S., et al. (2022). Implementation of integrated nutrition intervention. Kesmas: National Public Health Journal.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2023.
- Lestari, N., et al. (2024). Evaluation of regional health policies in Indonesia. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia.
- Nugroho, R., et al. (2023). Public policy implementation in local government. Jurnal Ilmu Administrasi.
- Prasetyo, A., et al. (2022). Determinants of stunting reduction through collaborative governance. Journal of Public Policy Research.
- Putri, D., et al. (2023). Public administration perspective on stunting policy implementation. Jurnal Administrasi Negara.
- Rahmawati, F., et al. (2024). Regional development strategies for stunting reduction. Jurnal Perencanaan Pembangunan.
- Sari, I., et al. (2022). Policy evaluation in local government health programs. Jurnal Kebijakan Publik.
- Siregar, H., et al. (2023). Monitoring and evaluation system for health policy implementation. Journal of Governance.
- Sutrisno, B., et al. (2024). Government collaboration in public health programs. International Journal of Health Governance.
- Widodo, J., et al. (2022). Stunting reduction through local government innovation. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia.
- WHO. (2023). Levels and trends in child malnutrition.
- United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations.

UNICEF Indonesia. (2023). Formative evaluation of Indonesia's National Strategy to Accelerate Stunting Prevention. UNICEF Indonesia.

UNICEF Indonesia. (2024). Nutrition programme overview. UNICEF Indonesia.

World Health Organization. (2023). Guideline on the prevention and management of child wasting and nutritional oedema. World Health Organization.

World Health Organization. (2024). Child malnutrition. World Health Organization. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.